

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1950 Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah memiliki hubungan diplomatik sangat erat, bermula pada tahun 1949 di mana pengakuan Myanmar terhadap RRT hingga perayaan Ulang Tahun ke-68 berdirinya RRT yang diselenggarakan di Myanmar International Convention Center (MICC) di Nay Pyi Taw, Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan memiliki hubungan kerjasama yang cukup kuat terhadap RRT. Hal ini didukung dengan letak geografis Myanmar yang berbatasan langsung dengan RRT, sehingga dengan adanya letak geografis Myanmar yang berbatasan langsung dengan RRT memberikan keuntungan kerjasama bagi kedua negara dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Adanya penandatanganan perjanjian perdagangan pertama pada tahun 1954 hingga penandatanganan perbatasan RRT-Myanmar pada tahun 1960 adalah salah satu bukti yang menunjukkan mitra kerjasama RRT-Myanmar (Tech, 2017).

Kerjasama ekonomi antara RRT dan Myanmar bertujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian kedua negara. Hal ini cukup dibuktikan negara RRT sebagai investor utama Myanmar, di mana RRT menanamkan investasi sebesar US\$ 14,143 juta dengan total *Foreign Direct Investment* (FDI) sebesar 34,4% pada tahun 2012 (Karaman, 2014). Adapun bentuk investasi yang ditanamkan oleh RRT dinegara-negara Asia berupa makanan dan energi. Selain itu, RRT juga berinvestasi

di bidang pertambangan. Dengan adanya akses mudah dalam berinvestasi yang di dapatkan oleh RRT di negara Myanmar merupakan salah satu alasan mengapa RRT berinvestasi di negara Myanmar (The Guardian, 2012).

Dalam bidang militer, RRT telah menjadi pemasukan utama dalam pelatihan dan peralatan militer sejak tahun 1980. RRT juga memiliki kepentingan berupa menjaga stabilitas negaranya disepanjang perbatasan tersebut yakni dengan mengadakan kerjasama dengan militer, polisi, serta organisasi keamanan negara Myanmar (Clapp, 2015, pp. 4-5). Adapun bentuk kerjasama yang diberikan oleh RRT terhadap Myanmar berupa memberikan bantuan dalam membangun infrastruktur militer Myanmar di mana, RRT telah menyediakan beberapa fasilitas seperti senjata, tank, pesawat anti peluru, kapal angkatan laut, transportasi pesawat seperti helikopter, serta menyediakan fasilitas produksi tambang dan amunisi. Selain itu, Jia Chunwang, Menteri Keamanan Umum Myanmar telah melakukan kerjasama bilateral dalam keamanan perbatasan untuk memerangi isu perdagangan narkoba (Than, 2013, pp. 196-198).

Hubungan negara RRT dan Myanmar mengalami penurunan ketika negara Myanmar mengalami masa transisi politik dari pemerintahan Junta Militer menjadi negara yang lebih demokratis. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara RRT untuk dapat memperbaiki hubungan kedua negara. Hal ini bermula ketika negara Myanmar cenderung ingin menggunakan sistem politik dari Barat yang menganut nilai demokrasi. Sebelum mengalami masa transisi politik, negara Myanmar dikucilkan dari dunia internasional dan mendapatkan sanksi embargo. Hal ini dikarenakan, banyak terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dimulai dari terjadinya kekerasan yang dirasakan masyarakat sipil yang dilakukan

oleh militer Myanmar, pemutusan koneksi internet, adanya larangan terhadap media-media di Myanmar untuk memberikan tayangan mengenai informasi seputar dunia internasional, serta adanya penahanan terhadap tokoh pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi (South, 2004, pp. 235-237). Namun, banyaknya kecaman yang muncul terhadap negara Myanmar tidak membuat RRT membatasi hubungannya terhadap Myanmar. Justru sebaliknya, RRT memberikan pengaruh yang besar terhadap Myanmar yang ditandai dengan adanya perjanjian resmi *five principles of peaceful co-existence* pada tahun 1954 (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, N. a). RRT memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap negara Myanmar berupa pasokan sumber daya energi serta banyaknya proyek-proyek RRT di Myanmar membuat RRT menguatkan hubungan bilateralnya dengan Myanmar ditandai dengan adanya perjanjian tersebut.

Masa transisi politik Myanmar dimulai sejak tahun 2008 yang ditandai dengan disahkannya Republik Kesatuan Myanmar hingga adanya pemilu pada tahun 2010 hingga dibubarkannya pemerintahan Junta Militer pada 31 maret 2011 kemudian melantik Thein Sein menjadi presiden negara Myanmar. Pemilihan umum pertama yang dilakukan pada tanggal 7 november tahun 2010 ini di menangkan oleh The Union Solidarity and Development Party (USDP). USDP merupakan partai non-militer pertama yang memenangkan pemilihan umum pertama dipimpin oleh presiden Thein Sein.

Sejak dilantiknya Thein Sein menjadi presiden, perubahan banyak terjadi pada kebijakan luar negeri Myanmar seperti demokratisasi Myanmar. Sikap yang dilakukan Myanmar dalam membuka diri terhadap negara Barat cukup mempengaruhi hubungan bilateralnya dengan RRT, sehingga membuat investasi

RRT di Myanmar menurun secara drastis (Chan, 2013). Adanya kebijakan Thein Sein dalam memberhentikan proyek bendungan Myistone merupakan salah satu sikap yang menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri Myanmar terhadap RRT. Hal ini sangat membuktikan bahwa Myanmar mulai melepaskan diri dari RRT dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan negara Amerika Serikat (AS), kebijakan pemberhentian proyek ini akan sangat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara (Sun, 2013).

RRT memiliki kepentingan utama berupa membangun jalur pipa minyak mentah yang dibangun di pantai Burma hingga jalur pipa tersebut menghubungkan teluk Bengal hingga ke barat daya, RRT-Mainland di mana jalur pipa minyak dan gas tersebut akan memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi RRT salah satunya yakni dapat meningkatkan perekonomian wilayah Kunming di RRT (Ramzy, 2017). Sedangkan kepentingan dalam bidang politik, RRT ingin menggeser pengaruh AS di Myanmar dan mengharap dukungan Myanmar terhadap posisinya dalam sengketa Laut China Selatan yang akan dipaparkan oleh penulis pada bab analisis. Oleh karena itu, tidak heran apabila RRT berupaya menjalin kerjasama dengan Myanmar jika dilihat dari kepentingannya terhadap negara Myanmar.

Dalam mempertahankan kepentingan negaranya, RRT berusaha untuk tetap menjaga hubungan bilateralnya dengan Myanmar untuk tetap terjalin dengan baik. Adapun usaha yang dilakukan RRT untuk menjaga hubungan bilateralnya dengan Myanmar yakni melalui cara diplomasi untuk mengurangi sentimen anti RRT yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat Myanmar (Kate, 2011). Kemudian RRT menunjukkan sikap-sikap baik terhadap Myanmar yang ditunjukkan melalui

dukungan RRT dalam kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya pada permasalahan domestik negara Myanmar. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang tinggal di Myanmar tepatnya di wilayah Rakhine di mana etnis ini di dominasi oleh masyarakat Muslim dan menjadi etnis minoritas di Myanmar.

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya bukan berasal dari negaranya walaupun di sisi lain Rohingya menganggap bahwa mereka adalah masyarakat Myanmar. Sebagai etnis minoritas di negara Myanmar membuat Rohingya mendapat perlakuan tidak baik dari masyarakat Myanmar maupun pemerintah Myanmar sendiri. Etnis Rohingya mengalami diskriminasi baik secara budaya maupun ekonomi, dari hal tersebut menimbulkan konflik etnis berkepanjangan di negara tersebut. (Wekke, 2016, p. 75). Sehingga pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan penolakan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya.

Penolakan negara Myanmar terhadap pemberian kewarganegaraan disebabkan karena etnis Rohingya tidak termasuk kedalam daftar etnis di Myanmar dan mereka tidak memenuhi syarat hukum untuk bisa mendapatkan status kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan pada tahun 1982 yang menegaskan bahwa apabila Rohingya ingin diberikan status kewarganegaraan maka etnis tersebut harus mampu memberikan bukti yang akurat bahwa mereka telah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823. Namun, yang terjadi adalah Rohingya tidak cukup memiliki bukti tersebut sehingga mereka tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan (Perlez, 2014). Adapun kebijakan pemerintah Myanmar dalam penolakan pemberian status kewarganegaraan kepada Rohingya ini di dukung oleh RRT. Sehingga, RRT disinyalir memiliki kepentingan

terhadap negara Myanmar salah satunya dalam membangun jalur pipa minyak dan gas di wilayah Rakhine tempat Rohingya berada.

Dari apa yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik ingin memahami lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Kemudian peneliti juga akan membahas kepentingan-kepentingan RRT terhadap Myanmar serta bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya Periode 2012-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang yang mengenai kepentingan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, ada satu rumusan masalah yang ditarik : Mengapa kepentingan-kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepentingan utama RRT di Myanmar.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.

3. Untuk menganalisis bagaimana kepentingan RRT di anggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar.

1.4 Signifikansi

Topik dalam penelitian ini cukup penting untuk diteliti mengingat permasalahan etnis Rohingya tidak kunjung usai sejak tahun 1826 di mana negara Inggris mulai menguasai Myanmar pada Perang Dunia I. Kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dalam menolak etnis tersebut mendapat banyak kecaman dari dunia internasional. Adapun kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya berupa kekerasan junta militer serta penolakan pemberian kewarganegaraan terhadap Rohingya. Peneliti melihat dari sisi dukungan yang diberikan oleh pemerintah RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar dalam menolak keberadaan etnis Rohingya. Di lihat dari pernyataan dukungan dari Kementrian Luar Negeri hingga upaya yang dilakukan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar untuk menjalankan kepentingan-kepentingan RRT. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepentingan utama RRT berupa jalur pipa minyak dan gas yang dibangun dari Kyauk Phyu menuju wilayah Kunming.

Oleh karena itu, peneliti mencoba membahas dari sisi lain yaitu mengapa kepentingan-kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti yang mana penelitian ini belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menjadi keunikan tersendiri dalam penelitian ini karena hingga saat ini belum ada penelitian yang membahas mengenai mengapa kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana kepentingan-kepentingan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian dengan topik isu Rohingya merupakan kajian yang sering diteliti dalam lingkup politik pemerintah RRT. Namun penelitian ini hanya akan memfokuskan pada tahun 2012 hingga 2017. Penulis mengambil periode 2012 hingga 2017 dikarenakan pada tahun 2012 merupakan puncak FDI RRT di Myanmar bersamaan dengan puncak penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Rohingya. Pada tahun 2012, telah terjadi konflik agama antara masyarakat Rohingya yang mayoritasnya Muslim dengan masyarakat Rakhine yang beragama Budha. Kemudian militer Myanmar juga telah melakukan serangan pembalasan terhadap kelompok bersenjata Rohingya yang terjadi pada tahun 2016. Di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas secara khusus bagaimana kepentingan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Untuk memperdalam analisis ini penulis akan mencoba menganalisis mengapa kepentingan-kepentingan tersebut dianggap sebagai salah satu alasan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Selain itu, peneliti juga akan membahas bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Myanmar untuk mengusir etnis Rohingya dari negaranya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Kepentingan RRT terhadap Myanmar :

Membahas mengenai hubungan baik antara RRT dan Myanmar di antara kawasan Asia Tenggara pada umumnya sangat erat jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kawasan tersebut. Tidak hanya karena letak geografisnya yang dekat, namun juga ditandai dengan persamaan agama, etnis, dan budaya. Jika dibandingkan dengan negara-negara dengan mayoritas agamanya Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Dalam hubungan bilateral yang baik antara RRT dan Myanmar, tentu saja terselip sebuah kepentingan RRT terhadap Myanmar. Kepentingan utama RRT terhadap Myanmar yang utama adalah kepentingan ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya proyek yang telah direalisasikan oleh pemerintah RRT seperti pembangunan transportasi minyak mentah dan gas alam dari Myanmar menuju RRT melalui pembuatan pipa dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Pada proyek kedua, RRT membangun bendungan hidroelektrik di sepanjang daerah aliran hulu Sungai Irrawaddy, Myanmar. Di mana pada proyek yang kedua ini membuat perdagangan ekonomi kedua negara semakin meningkat yakni ekspor RRT mencapai angka 53% pada tahun 2010, sedangkan impornya mencapai angka 49%. Dengan adanya perdagangan ekonomi kedua negara, sehingga RRT memainkan peran penting dalam perekonomian Myanmar, sehingga RRT memiliki strategi terkhusus untuk mengatur keuntungannya sendiri (Djelantik, 2015, pp. 261-262).

Dalam kerjasama untuk mencapai kepentingan RRT dan Myanmar dapat kita lihat bahwa keuntungan yang didapatkan oleh RRT dalam jangka panjang. Peran industri RRT di wilayah Asia ini sangatlah luas sehingga RRT dapat

dikatakan berhasil dalam mengekspor modal bisnisnya. RRT menggunakan hubungan ekonominya dengan Myanmar sebagai kebijakan luar negeri RRT, mengingat RRT menggunakan kekuatan yang dimilikinya dengan melayani berbagai macam kepentingan global untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. RRT juga sangat memanfaatkan peluang investasi dengan Myanmar agar terhubung dengan negara-negara di Timur Tengah seperti India sebagai gerbang keuntungan negara RRT. Dari keterangan diatas dapat terlihat bahwa ada kepentingan RRT terhadap Myanmar sebagai penghubung jalannya RRT ke negara-negara Timur Tengah (Chan-Kim, 2016, pp. 1-16).

RRT dapat dikatakan menjadi pemeran utama dalam permainan ekonomi dunia dengan kurun waktu kurang lebih tiga dekade. Jika melihat dari sejarah perekonomian RRT sangat terlihat perubahan perekonomian RRT berkembang sejak Beijing meluncurkan diplomasi bantuan luar negeri pada saat berdirinya RRT pada tahun 1949. RRT memiliki keinginan untuk menantang negara AS dan Uni Soviet agar RRT mampu bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Hal ini sangat terlihat bahwa RRT ingin menguasai dunia setelah berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya di wilayah Asia. Tidak hanya itu, RRT telah memberikan bantuan ekonomi pada sejumlah negara berkembang dengan tujuan agar mendapatkan dukungan dari negara-negara tersebut dan mengurangi pengaruh AS di kawasan Asia (Copper, 2016, p. 141).

Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap Rohingya :

Etnis Rohingya pada mulanya berimigrasi dari negara India dan Bangladesh, terdapat kurang lebih 1,4 juta etnis Rohingya yang tinggal dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun, mayoritas etnis tersebut tinggal di Burma,

Myanmar. Etnis Rohingya, yang notabeneanya merupakan etnis minoritas di Myanmar ini telah mengalami penindasan sejak tahun 1948 walaupun mereka telah menempati tanah Rakhine sebelum kemerdekaan negara Myanmar. Adapun ancaman kekerasan terhadap Rohingya merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar untuk mengusir etnis Rohingya melalui militer. Di mana, kebijakan pemerintah Myanmar yaitu dengan menerapkan kebijakan asimilasi secara paksa serta tidak mengakui adanya etnis tersebut. Laporan Amnesty International, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya berupa kekerasan junta militer yang meliputi penolakan pemberian kewarganegaraan, pembatasan untuk berpindah, adanya pembatasan kegiatan ekonomi maupun pendidikan, serta maraknya pembunuhan, pelecehan, penyiksaan, dan kerusuhan anti Muslim Rohingya (Mitzy, 2014, pp. 154-155).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ini dianggap telah melanggar aturan hukum internasional. Hal ini dilihat dari adanya pelanggaran kewarganegaraan di mana Rohingya pada awalnya telah menempati negara Myanmar bahkan sebelum kemerdekaan Myanmar tahun 1898. Sikap pemerintah Myanmar dalam membiarkan Rohingya tidak memiliki identitas yang jelas telah melanggar UU Keimigrasian Tahun 1947 dan UU Kewarganegaraan Tahun 1982 yang sangat bertentangan dengan Konvensi Kewarganegaraan dan Konvensi Anti Diskriminasi. Di mana, dalam Konvensi tersebut menyebutkan bahwa terdapat larangan untuk negara-negara anggota yang cenderung melakukan diskriminasi perbedaan etnis maupun agama, sehingga mereka tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya dalam kehidupan bernegara. Pelanggaran lain yang dilakukan pemerintah Myanmar yakni, pemerintah

Myanmar membiarkan adanya konflik etnis yang terjadi antara Budha dan Rohingya yang menyebabkan ribuan nyawa warga Rohingya melayang. Pemerintah Myanmar dianggap melanggar karena tidak melaksanakan kewajiban internasional dalam mencegah kekerasan masyarakatnya. Adapun konflik tersebut justru melibatkan polisi dan tentara Myanmar dalam melakukan pembantaian terhadap Rohingya (Thontowi, 2013, p. 46).

Berdasarkan pada tulisan-tulisan di atas, topik penelitian mengenai Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya hanya fokus membahas persoalan kepentingan yang dimiliki RRT terhadap negara Myanmar dan kebijakan pemerintah Myanmar yang sangat diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Namun, tidak banyak yang mencoba meneliti mengapa kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis mengapa kepentingan-kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.

1.7 Perspektif Teori/Konsep/Pendekatan

Rational Choice Theory :

Pada tulisan penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* (RCT). RCT pada awalnya muncul berdasarkan pada asumsi dasar dari perilaku aktor ekonomi. Asumsi tersebut memprediksi bahwa perilaku manusia selalu dimotivasi oleh uang dan keuntungan. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti berdasarkan pada pemikiran rasional. Sebelum memutuskan sebuah tindakan, setiap individu pasti akan

memprediksi biaya yang dikeluarkan dan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. RCT pertama kali dipopulerkan oleh James S. Coleman dalam jurnalnya yang berjudul *Rationality and Society* pada tahun 1989. James S. Coleman beranggapan bahwa RCT merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara rasional untuk melakukan sebuah tindakan yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Di mana tujuan yang tersebut ditentukan oleh perhitungan, nilai, sebuah pilihan. Teori ini muncul dari ilmu ekonomi di lihat dari aktor dalam memilih sebuah tindakan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat serta meminimalisir resiko yang mungkin saja terjadi (Clark, 1996, pp. 293-294).

Coleman mengeluarkan dua unsur utama dalam teorinya yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya dalam teori Coleman berarti bahwa sesuatu yang menarik perhatian dan sumber daya tersebut dapat dikendalikan oleh aktor lain, yang dimaksud dengan aktor adalah seseorang yang memiliki peran dalam melakukan sebuah tindakan, yang mana tindakan tersebut dilakukan untuk sebuah tujuan. Dalam sistem sosial, setidaknya melibatkan dua aktor yang dapat mengendalikan sumber daya tersebut. Keberadaan sumber daya menjadi sebuah pengikat bagi kedua aktor dan menyebabkan sifat saling membutuhkan antara keduanya (Ritzer, 2008, p. 449).

Jika dilihat dari perspektif ilmu ekonomi dan politik, RCT diasumsikan sebagai aktor yang ingin mencapai kepentingannya. Aktor ini pada nantinya akan memanfaatkan peluang-peluang yang bisa di dapatkan untuk dapat mencapai kepentingannya dengan perhitungan-perhitungan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka panjang (Deliarnov, 2006, p. 134). Pada umumnya perilaku dari *rational action* ini memiliki sifat yang egois dengan segala

tindakannya yang berdasarkan perhitungan untuk menemukan cara yang lebih efisien dalam mencapai tujuannya. Sehingga, optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan kata kunci dari RCT. Seperti yang telah dirumuskan James B. Rule dalam terjemahannya sebagai berikut:

Tindakan manusia (human action) pada dasarnya adalah “instrumen” (dalam arti;alat bantu), agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyaknya jarak jauh. Untuk manusia, atau untuk kesatuan yang lebih besar, tujuan atau nilai tersusun secara hierarkis yang mencerminkan prefensinya mengenai apa yang diinginkan atau diperlukannya. Hierarki prefensi ini relatif stabil. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Informasi relevan yang dimiliki oleh aktor sangat mempengaruhi hasil dari perhitungannya. Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal besar seperti *ratings*, institusi dan praktik-praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. Mungkin akibat dari pilihan kedua, pilihan ketiga, atau pilihan N perlu dilacak (Budiarjo, 2008, pp. 93-94).

Pada konsep dasar RCT definisi Rasional dalam RCT memiliki definisi yang berbeda dengan definisi rasional dalam bahasa keseharian. ‘Rasional’ yang dimaksud dalam RCT adalah kebijaksanaan dalam pemikiran yang kritis untuk dapat mengetahui dan melakukan hal apa yang dilakukan agar mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. RCT menggunakan definisi yang berfokus pada tindakan-tindakan individu yang menyeimbangkan antara kerugian (*cost*) dan keuntungan (*benefit*). Segala tindakan yang dilakukan oleh aktor dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Seluruh proses dalam mengambil sebuah tindakan ‘rasional’ yang dipikirkan melalui pemikiran secara nalar maupun diluar nalar tetap dianggap sebagai pemikiran secara ‘rasional’ (Rosidin, 2015, pp. 270-271). Dalam RCT, setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan perhitungan maupun pemikiran secara rasional pada akhirnya tetap akan mendapatkan keuntungan dan kerugian. Sehingga, penerapan mekanisme teori ini sangat mempertimbangkan antara keuntungan dan kerugian. Berikut poin-poin yang menjadi inti dari RCT sebagai berikut:

1. Aktor dalam pemikiran rasional akan bersikap seperti makhluk rasional yang berdasarkan pada perhitungan, kepentingan individu, kemudian melakukan tindakan secara maksimal agar meraih keuntungan dalam skala besar.
2. Aktor biasanya membuat lebih dari satu rancangan rencana agar tujuan mereka tetap berjalan apabila rencana awal tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.
3. Tindakan-tindakan yang dilakukan sepenuhnya untuk kesejahteraan sendiri (Ogu, 2013, p. 93).

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mengambil pilihan rasional dalam RCT:

1. Menentukan objek dan menargetkan tujuan.
2. Mengidentifikasi adanya kendala yang kemungkinan akan terjadi.
3. Menentukan aturan keputusan yang nantinya dapat mengantisipasi apabila terdapat kendala.
4. Menentukan bagaimana aturan keputusan yang dapat diseimbangi oleh aktor tujuan.
5. Meneliti mengenai kondisi eksternal aktor yang aktor tuju dan dapat memprediksi konsekuensi dari kondisi tersebut.
6. Memeriksa langkah dalam melakukan prediksi.
7. Konsisten dengan tujuannya.
8. Memberikan kesimpulan dan konsekuensi apa saja yang akan diterima, dan bagaimana konsekuensi tersebut akan mempengaruhi kebijakan sebuah

negara. Kemudian membuat keputusan yang memberikan keuntungan optimal (Ogu, 2013, p. 94).

Akan tetapi, dalam tindakan RCT terdapat dua hal yang menjadi hambatan utama diantaranya kelangkaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Institusi Sosial. Dalam kelangkaan SDA, aktor yang membutuhkan lebih dari satu SDA yang berbeda maka aktor tersebut juga harus menyediakan akses SDA yang berbeda. Dalam mencapai satu tujuan tersebut, aktor harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan akses tersebut sehingga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau SDA yang berbeda. Kemudian, hambatan dari Institusi Sosial dapat diartikan sebagai hambatan-hambatan dari berbagai institusional yang memiliki prinsip-prinsip positif maupun negatif dan dapat mendorong ataupun mencegah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor (Anshori, n.a , pp. 139-140).

Pemilihan RCT dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sebab atau alasan dukungan yang diberikan pemerintah RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Pada kenyataannya RRT telah mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politiknya. Hal ini sangat sesuai dengan penjelasan mengenai asumsi dasar RCT di mana perilaku dari rational action ini akan melakukan hal-hal yang diluar dugaan demi meraih keuntungan individu secara optimal. Terdapat dua variabel utama dalam RCT yaitu *cost and benefit*. Di mana, (*cost*) dapat dilihat dari konsekuensi yang di dapat oleh RRT yang menerapkan strategi untuk mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Namun, sikap tersebut tentu saja diambil melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan negara dengan

hubungan luar agar mendapatkan keuntungan (*benefit*). Peneliti juga akan mengaitkan bagaimana dua hambatan utama dalam RCT terhadap proyek utama RRT di Myanmar. Penggunaan RCT sangat membantu untuk memperdalam analisis ini agar dapat mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan RRT demi mendapatkan kepentingan ekonomi dan politiknya di Myanmar.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif, mengingat metode ini dianggap sebagai salah satu metode yang tepat untuk memenuhi tujuan penelitian. Karena penelitian ini membahas mengenai fenomena politik pemerintahan RRT maka, penelitian ini akan berisi analisis yang sifatnya deskriptif didukung dengan data-data yang akan disajikan oleh peneliti. Landasan teori yang digunakan juga akan sangat mempengaruhi metodologi penelitian sehingga keduanya harus saling berkaitan sebagai fungsi lain untuk memberikan gambaran secara umum.

Dalam penelitian kualitatif hasil dari penelitian ini tidak menggunakan berbagai macam prosedur angka dalam proses pengumpulan datanya. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis yang mendalam sehingga menggunakan proses berdasarkan pada perspektif objek yang ditampilkan dalam penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini pada umumnya menggunakan penjelasan dengan kata-kata kemudian disertakan dengan gambar-gambar sebagai sumber data dalam angka atau rekaman. Analisis ini juga

cenderung induktif dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti (Sugiarto, 2015, pp. 8-9).

Penelitian kualitatif ini lebih mengacu pada bagaimana cara mencari makna, pengertian, pemahaman mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang diangkat dalam penelitian kehidupan manusia yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Maupun tidak terlibat secara langsung dalam permasalahan yang sedang diteliti secara kontekstual dan secara menyeluruh. Penelitian ini tidak menggunakan cara dengan hanya mengumpulkan data sekali kemudian langsung mengolahnya sekaligus, melainkan dengan cara bertahap dari makna atau data-data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan dengan bersifat naratif dan holistik (Yusuf, 2017, p. 328).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang berjudul Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya Periode 2012-2017 yaitu negara RRT dan negara Myanmar, serta etnis Rohingya sebagai etnis Muslim minoritas di Myanmar. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah RRT dalam kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dianggap sebagai sebuah formalitas dalam menjalankan kepentingan-kepentingan negaranya di negara Myanmar. Selain itu, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan dalam mengusir etnis Rohingya yang notabenenya menyebabkan pelanggaran HAM dan ribuan etnis Rohingya meninggal dunia.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Metode penelitian secara kualitatif ini peneliti akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak-pihak lain. Dalam artian data yang akan didapatkan berupa informasi yang dilakukan melalui data-data lapangan, sehingga peneliti hanya menggunakan data-data yang sudah terkumpul untuk penelitiannya. Peneliti hanya perlu meminta data tersebut, mengakses, dan mencatat data yang telah didapatkan (Istijanto, n. a, p. 38). Selain menggunakan buku, jurnal, majalah, dokumen, peneliti juga akan melakukan literatur yang akan bersangkutan dengan penelitian serta mengakses perpustakaan elektronik (e-library) seperti JSTOR, Sci-Hub.tw, Proquest, Libgen, maupun Portal Garuda, serta media relevan lainnya.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian pustaka untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak hanya itu, literatur review dilakukan untuk menemukan data-data penting yang nantinya akan diangkat kedalam penulisan skripsi serta untuk mengetahui bagaimana sisi keunikan pada penelitian ini. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, dokumen resmi, jurnal, maupun internet. Data yang didapatkan akan digunakan sebagai bahan-bahan penting untuk mendukung argumen peneliti. Setelah semua data sudah terkumpul, peneliti kembali mengolah data tersebut menjadi data sederhana dan mudah dipahami dalam penulisan skripsi, serta melakukan pendalaman analisa untuk dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diangkat dalam skripsi ini.